

Pengaruh Kemandirian Daerah dan *Level of Capital Outlay* Terhadap *Financial Distress*: Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023

Irfan Nazar Ali^{1*}, Fefri Indra Arza²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: irfannazarali162@gmail.com

Tanggal Masuk:
10 Februari 2025
Tanggal Revisi:
24 Mei 2025
Tanggal Diterima:
26 Mei 2025

Keywords: *Financial Distress; Regional Financial Independence; Level of Capital Outlay.*

How to cite (APA 6th style)

Ali, I. N., & Arza, F. I. (2025). Pengaruh Kemandirian Daerah dan Level of Capital Outlay terhadap *Financial Distress*: Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (2), 736-748.

Abstract

This research examines the influence of regional financial independence and the level of capital outlay on financial distress in district and city governments in West Sumatra for the 2019-2023 period. Financial distress in local governments is an important issue because it affects their ability to provide public services effectively. With a quantitative approach, this research uses secondary data from the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance. The sample was determined using a purposive sampling technique, and a sample of 95 samples was obtained. The analysis was carried out using multiple linear regression with SPSS version 26 software. The research results showed that regional financial independence had a significant positive effect on financial distress. Meanwhile, the level of capital outlay also has a significant positive effect on financial distress.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i2.2630>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Reformasi keuangan dan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pengeluaran mereka. Namun, perubahan dalam regulasi, seperti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan batas belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, yang harus disesuaikan dalam waktu lima tahun.

Di Provinsi Sumatera Barat, alokasi belanja pegawai meningkat dari 43,67% pada 2019 menjadi 46,28% pada 2021, sementara belanja modal mengalami penurunan signifikan dari 51,65% menjadi 33,26% pada periode yang sama. Penurunan belanja modal ini berisiko

menghambat investasi daerah dalam infrastruktur dan pelayanan publik, yang berpotensi menyebabkan *financial distress*.

Financial distress dalam sektor publik mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mendanai operasi, infrastruktur, dan pembangunan, sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Menurut Jones dan Walker (2007) dalam Syurmita (2014) *financial distress* pada sektor pemerintahan pemerintah merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan.

Memprediksi *financial distress* menjadi penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan mengambil langkah antisipatif guna mengurangi risiko keuangan. Pemerintah daerah di Sumatera Barat mengalami penurunan belanja modal rata-rata sebesar 12,67% per tahun pada 2019-2021, menunjukkan tren yang mengarah pada potensi *financial distress*. Rata-rata kontribusi belanja modal Provinsi Sumatera barat masih tergolong rendah. Angka ini masih dibawah standar yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022, yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal infrastruktur publik minimal 40% dari total APBD. Dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah daerah masih banyak alokasi belanja modalnya belum mencapai standar minimal yang sudah ditetapkan yang menandakan masih rendahnya investasi yang dilakukan pemerintah daerah dan kondisi ini menggambarkan adanya risiko *financial distress*.

Financial distress pada pemerintahan daerah bisa menjadi faktor penilaian untuk mengevaluasi kinerjanya dalam mengelola keuangan dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan masyarakat. Kinerja pemerintah daerah tersebut bisa dilihat melalui laporan keuangan masing-masing daerah. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan banyaknya faktor atau indikator yang mempengaruhi *financial distress* pemerintah daerah. Salah satunya penelitian Jones & Walker (2007) seperti yang dikutip oleh Syurmita (2014) menggunakan dua indikator untuk memprediksi terjadinya *financial distress* negara bagian di Australia, yaitu indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan terdiri dari besaran dana yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur pelayanan publik dan rasio-rasio kinerja keuangan, sedangkan indikator non-keuangan terdiri dari karakteristik dewan dan kualitas pelayanan publik (Syurmita, 2014).

Penelitian terdahulu tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap *financial distress* yang dilakukan Syurmita (2014) ditemukan bahwa kemandirian keuangan memiliki arah negatif signifikan terhadap kondisi *financial distress*. Mahayani & Gayatri (2017) menemukan bahwa kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Husniati *et al.* (2016) yang membuktikan bahwa kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *financial distress*.

Penelitian ini berfokus pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023, dengan mempertimbangkan bahwa banyak daerah masih mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk belanja pegawai dibandingkan belanja modal. Dengan adanya kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dan belanja modal minimal 40% sesuai UU HKPD, penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan *financial distress*, khususnya dari aspek kemandirian daerah dan *level of capital outlay*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai “Pengaruh Kemandirian Daerah dan *Level of Capital Outlay* Terhadap *Financial Distress* Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Periode 2019-2021”.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Ketergantungan Sumber Daya

Menurut Emerson (1961) dalam (Mahayani & Gayatri, 2017), menjelaskan tentang hubungan antara konsep kekuasaan dengan konsep ketergantungan dalam suatu organisasi. Ketergantungan merupakan bagian utama dari kekuasaan, dimana organisasi yang memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar terkait tugas dan wewenang organisasi tersebut. Untuk mengatur hubungan saling ketergantungan organisasi dapat memakai strategi kerjasama dari Prespektif yang dibangun oleh Pfeffer dan Salancik (1978) dalam (Syurmita, 2014), menjelaskan bahwa organisasi menurut mereka bergantung secara eksternal terhadap resources dan sumber daya dapat memberikan pengaruh kekuasaan kepada organisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam mengelola daerahnya masing-masing. Dalam sektor publik menggambarkan kekuasaan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dalam mencapai tujuan organisasi untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat.

Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

Ruang lingkup keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi: (a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) Penerimaan daerah; (d) Pengeluaran daerah; (e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; (f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Financial Distress

Financial distress adalah kondisi di mana suatu entitas mengalami kesulitan keuangan yang dapat mengarah pada kebangkrutan atau ketidakmampuan membayar utang. Menurut Hutabarat (2021), *financial distress* merupakan tahap sebelum kebangkrutan, di mana entitas masih memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi keuangannya sebelum benar-benar bangkrut. Dalam konteks pemerintahan, *financial distress* terjadi akibat ketidakseimbangan antara sumber daya yang dimiliki dan kebutuhan belanja, seperti yang dijelaskan oleh Mahayani & Gayatri (2017). Syurmita (2014) menambahkan bahwa pengeluaran rutin yang tidak terkendali menyebabkan pemerintah daerah mengurangi belanja modal, yang berdampak pada kondisi *financial distress*.

Jenis-Jenis Financial Distress

Menurut Patunrui & Yati (2017), *financial distress* dikategorikan menjadi empat jenis utama:

1. Economic Failure – Terjadi ketika suatu entitas tidak mampu bertahan dalam kondisi ekonomi sulit, namun masih dapat beroperasi selama ada dukungan kreditur.

2. Business Failure – Suatu bisnis tidak dapat lagi menghasilkan keuntungan untuk mempertahankan operasinya akibat penurunan penjualan, kegagalan adaptasi pasar, atau kesalahan manajerial.
3. Insolvency – Terbagi menjadi:
 - a. Technical insolvency, di mana kewajiban melebihi total aset tetapi arus kas masih ada.
 - b. Insolvency in Bankruptcy Sense, yaitu kondisi di mana entitas tidak mampu membayar utang karena asetnya tidak mencukupi untuk dilikuidasi.
4. Legal Bankruptcy – Kondisi di mana suatu entitas secara resmi dinyatakan bangkrut oleh pengadilan karena tidak mampu melunasi kewajibannya.

Penyebab *Financial Distress*

Diwanti & Purwanto (2020) mengidentifikasi tiga penyebab utama *financial distress*:

1. Model Neoklasik – *Financial distress* terjadi karena alokasi sumber daya yang tidak efisien dalam operasional perusahaan.
2. Struktur Keuangan yang Tidak Likuid – Meski aset dan model keuangan sudah sesuai, likuiditas yang buruk dapat menyebabkan kegagalan bisnis dalam jangka pendek.
3. Model Tata Kelola Perusahaan – Kebangkrutan dapat terjadi meskipun aset dan struktur keuangan sudah benar, tetapi manajemen yang buruk menyebabkan ketidakefisienan dan kegagalan operasional.

Dalam pemerintahan daerah, *financial distress* sering terjadi akibat ketidakmampuan mengalokasikan belanja modal yang cukup. Belanja modal yang optimal seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, *financial distress* dalam pemerintahan sering diukur dengan membandingkan pengeluaran belanja modal terhadap total belanja daerah.

Kemandirian Daerah

Kemampuan pendapatan daerah dalam memenuhi kebutuhannya dalam rangka memelihara sistem pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah dikenal dengan istilah kemandirian keuangan (Windiyanti & Isfaatun, 2019). Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dihasilkan oleh daerahnya sendiri untuk mendukung pembangunan lokal, membiayai berbagai kegiatan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat (Illahi et al., 2021).

Kemandirian keuangan mencerminkan seberapa efektif suatu wilayah memanfaatkan sumber daya keuangannya sendiri untuk mendukung program-programnya tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau daerah lainnya. Agar tersedia dana belanja modal yang dapat dialokasikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan penduduk tersebut, maka jumlah penduduk yang tinggi menandakan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi (Wicaksono, 2015).

Kemandirian keuangan memperlihatkan kapasitas PAD dalam memenuhi kebutuhan daerah, termasuk biaya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan pendapatan pajak dan retribusi sebagai sumber dana utama. Ini menunjukkan kemampuan kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) dalam mendanai aktivitasnya sendiri (Pinasti & Poerwati, 2022). Windiyanti & Isfaatun (2019) juga menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya

keuangannya sendiri untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang didukung oleh pendapatan pajak yang telah diterima.

Level of Capital Outlay (LCO)

Level of capital outlay adalah rasio antara belanja modal dan pendapatan asli daerah untuk menunjukkan tingkat pengeluaran modal, yang merupakan ukuran seberapa efisien pemerintah daerah beroperasi. Indikator ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk secara efektif mengelola operasional yang didanai oleh pendapatan asli daerah.

Dengan membandingkan jumlah realisasi belanja modal dengan jumlah PAD yang diterima pemerintah dari sumber daya atau potensi yang tersedia di daerah, LCO memberikan gambaran kinerja pemerintah yang efisien. Karena jumlah belanja melebihi kemampuan daerah untuk mendanai belanja tersebut, maka rasio LCO yang lebih tinggi menunjukkan kinerja pemerintah yang tidak efisien. Akibatnya, rasio yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan pemerintah mengalami kesulitan keuangan, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengeluarkan banyak uang (Mahayani & Gayatri, 2017).

Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Financial Distress

Kemandirian keuangan adalah kemampuan atau kontribusi pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya dalam upaya untuk menjalankan sistem pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerahnya (Elfiana & Arza, 2022). Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah merupakan kemampuan dari Pemerintah Daerah dalam mengelola sumberdaya yang dihasilkan daerahnya untuk digunakan dalam pembangunan daerah serta mampu membiayai setiap kegiatan yang dilakukannya, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Semakin tinggi kemandirian keuangan Pemerintah Daerah berarti daerah tersebut memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dengan mengalokasikan belanja modal lebih banyak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga probabilitas mengalami *financial distress* akan kecil kemungkinannya dibandingkan dengan daerah yang kemandirian keuangannya rendah (Illahi *et al.*, 2021).

Sesuai dengan pandangan teori ketergantungan sumber daya bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki kemandirian keuangan akan memiliki kekuatan untuk survive dan terhindar dari *financial distress*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syurmita (2014), Wicaksono (2015), dan Pranoto *et al.* (2022), menyatakan bahwa kemandirian keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*, hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki kemandirian keuangan tinggi yang tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, cenderung memiliki ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran diluar kebutuhan rutin dan tidak akan mengalami *financial distress*. Sehingga semakin tinggi Tingkat kemandirian daerah maka semakin rendah kemungkinan terjadinya *financial distress*. Berdasarkan penjabaran tersebut peneliti mengembangkan hipotesis:

H1 : Kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap financial distress

Pengaruh Level of Capital Outlay Terhadap Financial Distress

Level of Capital Outlay (LCO) digunakan untuk menggambarkan efisiensi pemerintah. Menurut Husniati *et al.* (2016), *level of capital outlay* dianggap sebagai indikator untuk menilai kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan membandingkan jumlah belanja modal dengan pendapatan asli daerah. Tingginya rasio *level of capital outlay* pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak efisien karena jumlah pengeluaran lebih besar dari kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Semakin tinggi angka rasio ini maka semakin besar probabilitas daerah untuk mengalami *financial distress*.

Sesuai dengan teori ketergantungan sumber daya dalam konteks pemerintahan, pemerintah yang mampu mengelola sumber dayanya untuk mendanai pengeluarannya sendiri dengan sedikit atau tidak bergantung pada pemerintah pusat akan mengurangi terjadinya tekanan keuangan yang akan mengantar pemerintah daerah pada kondisi *financial distress*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahayani & Gayatri (2017) dan Rahmatika & Imron (2022), menyatakan bahwa *level of capital outlay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*, hal ini menjelaskan bahwa modal yang dikeluarkan pemerintah lebih besar dari pendapatan asli daerah yang diperoleh, menandakan pemerintah tidak mampu melakukan penghematan dalam proses menghasilkan pendapatan asli daerah dan mengalami *financial distress*. Sehingga semakin tinggi rasio *level of capital outlay* maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya *financial distress* di pemerintahan tersebut. oleh karena itu peneliti mengembangkan hipotesis:

H2 : *Level of capital outlay* berpengaruh positif terhadap *financial distress*

METODE PENELITIAN

Jenis, Populasi dan Sampel

Jenis dari penelitian ini adalah asosiatif (hubungan), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Penelitian ini bersifat asosiatif kausal, yaitu suatu penelitian dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel, serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kemandirian daerah dan *Level of capital outlay* terhadap *financial distress*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat periode 2019-2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 19 Kabupaten dan Kota yang berada di Sumatera Barat. Total sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 95 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023.

Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasinya. Data ini dapat diperoleh dari sumber internal atau eksternal organisasi, dan dapat diakses melalui internet, pencarian dokumen, atau publikasi informasi. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah yang berada di kabupaten dan kota di Sumatera Barat selama periode 2019-2023. Sumber data berasal dari (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) DJPK Kementerian Keuangan RI, diakses melalui prosedur permintaan data di situs <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.

Pengukuran Variabel

Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai program kerjanya sendiri dengan menggunakan sumber daya keuangannya tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi. Kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan cara sebagai berikut (Illahi et al., 2021) :

$$\text{Kemandirian keuangan} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Level of capital outlay (LCO)

Level of capital outlay adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah, menunjukkan seberapa besar pengeluaran modal yang didanai oleh pendapatan asli daerah. Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan operasional dengan efisien menggunakan PAD. *Level of capital outlay* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut (Mahayani & Gayatri 2017) :

$$\text{LCO} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Financial Distress

Pemerintah daerah berada dalam status *financial distress* karena tidak mampu memberikan pelayanan publik akibat alokasi dana yang tidak tepat. Hal ini mengakibatkan ketersediaan dana untuk infrastruktur yang rendah jika dibanding anggaran untuk belanja lainnya, sehingga mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Pemerintah daerah yang tidak bisa mencapai tingkat belanja modal tersebut maka berpotensi untuk mengalami *financial distress*, karena seharusnya belanja modal bisa ditingkatkan dengan porsi yang lebih besar guna menyediakan pelayanan publik yang maksimal. *Financial distress* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut (Syurmita 2014) :

$$\text{Financial Distress} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan program SPSS dalam menganalisis data. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu regresi linear berganda yang merupakan metode statistik yang digunakan untuk memperjelas hubungan antara dua atau lebih variabel melalui persamaan. Sehingga dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = variabel independent financial distress

X_1 = variabel independent kemandirian daerah

X_2 = variabel independent level of capital outlay

α = konstanta

β_1 dan β_2 = koefisien regresi untuk masing-masing variabel independent (kemandirian daerah dan level of capital outlay)

e = error (kesalahan prediksi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Deskripsi statistik variabel penelitian

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Daerah	95	3.81	28.34	10.4215	4.80460
<i>Level of Capital Outlay</i>	95	51.48	740.41	176.7140	106.55166
<i>Financial Distress</i>	95	6.00	31.00	15.2632	4.60853

(Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 26)

Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Variabel kemandirian daerah memiliki nilai minimum 3.81 dan nilai maksimum 28.34 dengan rata-rata sebesar 10.4215 dan standar deviasi 4.80460. Variabel *level of capital outlay* dengan nilai minimum 51.48 dan nilai maksimum 740.41 dengan rata-rata sebesar 176.7140 dan standar deviasi 106.55166. Variabel *financial distress* memiliki nilai minimum 6.00 dan nilai maksimum 31.00 dengan rata-rata 15.2632 dan standar deviasi 4.60853.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Tabel 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.78760953
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.047
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.077 ^c

(Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 26)

Menurut Tabel Asymp. Sig. (2-tailed) adalah bernilai 0.077. yang berarti nilai ini lebih besar daripada 0,05 yang menjadi batas nilai paling rendah dalam pengujian normalitas data. Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa data sampel penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Kemandirian Keuangan (X1)	.623	1.605

LCO (X2)	.623	1.605
----------	------	-------

(Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 26)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang dilakukan dengan SPSS versi 26, didapatkan nilai $VIF < 10$ atau $Tolerance > 0,01$, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4
Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.796 ^a	.634	.626	2.81775	.997

(Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 26)

Berdasarkan tabel di atas nilai Durbin Watson sebesar 0.997, pembandingan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 95 (n), dan jumlah variabel independen 2 (k=2), maka di tabel Durbin Watson akan didapat nilai dL sebesar 1,623 dan dU sebesar 1,709, didapatkan nilai DW 0,997 kecil dari batas atas (du) 1,709 dan kurang dari 4 - 1.709 = (2.291), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-1.923	1.402		.174
	Kemandirian Keuangan (X1)	.070	.077	.123	.365
	LCO (X2)	.007	.004	.242	.077

(Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 26)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat signifikansi variabel kemandirian keuangan (X₁) terhadap absolut residual sebesar 0,365 > 0,05 dan signifikansi variabel LCO (X₂) terhadap absolut residual sebesar 0,077 > 0,05. Dengan demikian diambil kesimpulan bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Model

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.796 ^a	.634	.626	2.81775

Dari Tabel 6 diketahui untuk menghitung besarnya pengaruh kemandirian keuangan (X_1) dan LCO (X_2) terhadap *Financial Distress* (Y) dari tabel Model Summary, R Square = 0,634 ini berarti bahwa kontribusi kemandirian keuangan (X_1) dan LCO (X_2) terhadap *Financial Distress* (Y) adalah sebesar 63,4% dan 36,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar faktor kemandirian keuangan dan LCO.

b. Uji F (Simultan)

Tabel 7
Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1265.969	2	632.984	79.724	.000 ^b
	Residual	730.452	92	7.940		
	Total	1996.421	94			

(Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 26)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji F hitung sebesar 79,724 dengan signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen sehingga hipotesis yang diajukan yaitu variabel kemandirian keuangan dan LCO secara simultan berpengaruh terhadap variabel *Financial Distress*.

c. Uji Hipotesis

Tabel 8
Uji Hipotesis (Uji T)
Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.146	1.301		1.649	.102
	Kemandirian Keuangan (X_1)	.522	.077	.544	6.811	.000
	LCO (X_2)	.043	.003	1.005	12.575	.000

(Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 26)

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel di atas koefisien variabel kemandirian keuangan (X_1) sebesar 0,522 dan bernilai positif, dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ berarti variabel kemandirian keuangan memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Koefisien variabel *level of capital outlay* (X_2) sebesar 0,043 dan bernilai positif dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ berarti variabel *level of capital outlay* memberikan kontribusi positif dan signifikan *financial distress*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap *Financial Distress*

Hasil penelitian menemukan bahwa koefisien variabel kemandirian keuangan (X1) sebesar 0,522 dan bernilai positif, dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ berarti variabel kemandirian keuangan memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap *financial distress*, sehingga hipotesis (H₁) **ditolak**.

Sejalan dengan penelitian Elfiyana & Fefri (2022) mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan faktor keuangan terhadap kondisi *financial distress* di Indonesia, menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*. Begitu juga dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmatika & Imron (2022) mengenai pengaruh kemandirian daerah, solvabilitas, *level of capital outlay* terhadap *financial distress* pada saat pandemi covid-19 melalui jumlah penduduk sebagai pemoderasi pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2020, menemukan bahwa kemandirian daerah berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syurmita (2014) memukan bahwa kemandirian keuangan memiliki arah negatif signifikan terhadap kondisi *financial distress*.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pandangan teori ketergantungan sumber daya bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki kemandirian keuangan akan memiliki kekuatan untuk survive dan terhindar dari *financial distress*. Meski daerah memiliki kemandirian keuangan yang tinggi, jika pengelolaan anggaran tidak dilakukan dengan efisien, maka sumber daya yang ada bisa terbuang percuma. Misalnya, dalam pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran, atau penggunaan dana yang tidak optimal, yang mengarah pada pemborosan (Mahayani & Gayatri 2017).

Pengaruh *Level of Capital Outlay* Terhadap *Financial Distress*

Hasil penelitian menemukan bahwa koefisien variabel LCO (X2) sebesar 0,043 dan bernilai positif dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ berarti variabel LCO memberikan kontribusi positif dan signifikan *financial distress*, sehingga hipotesis (H₂) **diterima**.

Sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmatika & Imron (2022) mengenai pengaruh kemandirian daerah, solvabilitas, *level of capital outlay* terhadap *financial distress* pada saat pandemi covid-19 melalui jumlah penduduk sebagai pemoderasi pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2020, menemukan bahwa LCO berpengaruh terhadap *financial distress*. Juga sejalan dengan penelitian Mahayani & Gayatri (2017) mengenai jumlah penduduk sebagai pemoderasi pengaruh kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* terhadap *financial distress*, menemukan kemandirian keuangan dan LCO berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husniati *et al.* (2016) yang membuktikan bahwa kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *financial distress*.

Sesuai dengan teori ketergantungan sumber daya dalam konteks pemerintahan, pemerintah yang mampu mengelola sumber dayanya untuk mendanai pengeluarannya sendiri dengan sedikit atau tidak bergantung pada pemerintah pusat akan mengurangi terjadinya tekanan keuangan yang akan mengantar pemerintah daerah pada kondisi *financial distress*.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah peneliti lakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemandirian keuangan memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan mampu memprediksi *financial distress* pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. *Level of capital outlay* memberikan kontribusi positif dan signifikan *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa *level of capital outlay* keuangan mampu memprediksi *financial distress* pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Keterbatasan

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, antara lain penelitian ini hanya menggunakan indikator keuangan sebagai variabel independen dalam penelitian tanpa variabel non keuangan. Penelitian ini hanya mengambil sampel kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat sehingga penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengambil sampel yang lebih luas. Ukuran penentuan kategori *financial distress* dalam penelitian ini hanya sebatas pada data kuantitatif saja dengan fokus pada perbandingan masing-masing belanja pemerintah daerah.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini hanya menggunakan tahun pengamatan selama 5 periode, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah tahun periode pengamatan untuk memperoleh prediksi yang lebih efisien selain itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel penelitian lain seperti indikator non keuangan sebagai variabel independen. Beberapa contoh indikator non keuangan tersebut adalah good governance, kondisi wilayah, jumlah penduduk, pemekaran wilayah dan umur daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Diwanti, N. S., & Purwanto. (2020). the Influence of Financial Ratios and Good Corporate Governance Towards Financial Distress on Islamic Banks in Indonesia. *FIRM Journal of Management Studies*, 5(1), 1.
- Elfiyana, E., & Arza, F. I. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan terhadap Kondisi Financial Distress di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 425–437.
- <https://djpk.kemenkeu.go.id/> “Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI”. Accessed on date December, 10, 2024
- Husniati, S., Fitriasuri, & Wahasusmiah, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Abstract This study aims to predicted financial distress at the provincial government in Indonesia . Where , in the public sector is defined as the inability of the government to provide public services a. *Nasional Global Competitive Advantage*, 3(1), 149–158.
- Hutabarat, F. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Banten: Desanta Multiavisitama.
- Illahi, F., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2021). he Effect Of Financial Independence, Degree Of Decentralization And Shopping Harmony In Predicting The Status Of Financial Distress Of Regency And City Governments In West Sumatra Province 2015-2017. *Pareso Jurnal*, 3(3), 543–556.

- Mahayani, & Gayatri. (2017). *Jumlah Penduduk Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan Dan Level Of Capital Outlay Terhadap Financial Distress Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), B. 19, 452–478.*
- Patunrui, K. I. A., & Yati, S. (2017). Analisis Penilaian Financial Distress Menggunakan Model Altman (Z-Score) Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 55.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2019. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Pinasti, D., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh Rasio Efisiensi, Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 984–990.
- Pranoto, F. C., Hasthoro, H. A., & Nurwiyanta. (2022). Determinan Financial Distress Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Hasil Riset*, 7–14.
- Rahmatika, N. A., & Imron, M. (2022). Pengaruh Kemandirian Daerah, Solvabilitas, Level of Capital Outlay Terhadap Financial Distress Pada Saat Pandemi COVID-19 Melalui Jumlah Penduduk Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2022. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 437–444.
- Syurmita. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Prediksi Financial Distress. *Konferensi Regional Akuntansi (KRA)*, 1–28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2022. *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*
- Wicaksono, A. (2015). *Financial Distress pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia*. e-journal digilib UNS. Tesis.
- Windyanti, R., & Isfaatun, E. (2019). The Influence of Financial Independence, Solvency Ratio, Complexity, and Age of Government on the Financial Distress of District/City Governments in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(1), 49–60.